

## **ANALISIS BUDAYA LITERASI DIGITAL PEMERINTAH DESA SADANANYA KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS**

**Ii Sujai**<sup>1\*</sup>, Aditiyawarman<sup>2</sup>, Irfan Nursetiawan<sup>3</sup>, Dini Yuliani<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Jawa Barat, Indonesia

\*Korespondensi: sudjaipnd79@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tingkat literasi digital di Indonesia masih berada pada angka sedang, yakni pada angka 3.49 pada tahun 2022. Dari hasil observasi pendahuluan hal yang sama ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Sadananya, yakni tingkat literasi digital yang masih dalam tingkat sedang dan hal tersebut dibuktikan dengan masih belum sepenuhnya pelaksanaan e-government dijalankan dengan baik. Artinya penyelenggaraan pemerintahannya masih bersifat konvensional. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni Pemerintah Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan, yakni penelitian kualitatif deskriptif. Dimensi yang dipakai sebagai alat ukur, yakni berkaitan dengan kompetensi literasi digital. Adapun hasil dari penelitian ini, yakni budaya literasi digital Pemerintah Desa Sadananya cukup baik yang dibuktikan dengan beberapa public relationship telah dilaksanakan dengan memanfaatkan piranti dan platform digital dalam diseminasi informasi kepada khalayak ramai.

**Kata Kunci:** Budaya; Literasi Digital; Pemerintah Desa; Pemerintahan Desa

### **ABSTRACT**

*The level of digital literacy in Indonesia is still at a moderate level, namely at 3.49 in 2022. From the results of preliminary observations, what is shown by the Sadananya Village Government, namely the level of digital literacy is still at a moderate level and this is evidenced by the fact that the implementation of e-commerce has not yet been implemented. -government is run well. This means that the government is still conventional. The object of this research is the Sadananya Village Government, Sadananya District, Ciamis Regency. The research method used is descriptive qualitative research. The dimension used as a measuring tool is related to digital literacy competence. The results of this study, namely the digital literacy culture of the Sadana Village Government is quite good as evidenced by several public relations that have been carried out by utilizing digital devices and platforms in disseminating information to the general public.*

**Keywords:** *Culture; Digital Literacy; Village Government; Village Governance.*

## A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan internet dalam aspek pemerintahan mendorong terwujudnya *e-government*, yang diharapkan dapat membawa manfaat dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses ke informasi, meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakatnya dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan transparansi. Begitu pula, di tingkat Pemerintahan Desa tentunya harus adaptif dengan perkembangan teknologi informasi.

Walaupun demikian tingkat literasi digital Indonesia berada pada posisi skala angka 3.49 (Sumber: [aptika.kominfo.go.id](http://aptika.kominfo.go.id), 2022). Hal ini tentunya masih menjadi hal yang positif berkaitan dengan posisi literasi digital Indonesia.

Angka tersebut menunjukkan skala kondisi berada pada tingkat yang sedang. Adaptifme dari jenjang pemerintahan seharusnya dapat terbangun, ketika literasi digital menjadi pondasi awal dalam membangun dan membiasakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, juga menjadi hal yang harus terus dibangun sebagai bagian dari keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal penerapan sistem memang tidak terlepas dari aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek infrastruktur, aspek aplikasi dan aspek perencanaan. Sejalan dengan pendapat Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022) menyatakan, strategi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan telah melibatkan penggunaan teknologi informasi. Hal ini tentunya menjadi landasan, bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintahan desa harus juga turut andil

dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Berdasarkan hasil observasi terdapat permasalahan sebagai berikut: (1) Kurangnya pemahaman Perangkat Desa tentang sistem informasi; dan (2) Minimnya sumber daya manusia yang ada di desa, yang bisa mengoperasikan, mengolah, dan menganalisis informasi.

Menurut Rianto Puji, et al (2017:8) menyatakan suatu sistem informasi menyangkut keterkaitan beragam unit dalam organisasi yang mencakup infrastruktur dan suprastruktur, tidak terkecuali regulasi yang menjadi dasar operasionalisasi sistem tersebut. Dengan demikian informasi menjadi salah satu hal yang penting dalam tata kelola pemerintahan di perdesaan, sehingga diperlukan upaya dalam penerapan literasi digital di tingkat Pemerintah Desa. Digitalisasi perdesaan dengan adanya aksesibilitas jaringan internet diharapkan dapat mendorong penerapan literasi digital. Tetapi, dalam hal tersebut belum ada penelitian berkaitan dengan tingkat budaya

literasi digital di perangkat desa dan atau pemerintah desa.

Hal ini tentunya diperlukan penelitian yang komprehensif dan tentunya objektif. Digitalisasi seharusnya diimbangi dengan literasi, serta hal tersebut akan berdampak pada tingkat kompetensi perangkat desa dalam menerima, menganalisis, sampai dengan menyebarkan informasi yang telah mengalami vakiditas data dan kebenaran informasi itu sendiri. Adapun yang menjadi focus informan, yakni Pemerintah Desa Sadananya dan anggota dari kelembagaan Pemerintahan Desa.

Desa Sadananya tepatnya berada di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis merupakan desa yang termasuk desa yang mengiatkan berkaitan dengan literasi digital. Hal inilah yang mendorong kami untuk meneliti berkaitan dengan Analisis Budaya Literasi Digital Pemerintah Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, dimana tingkat literasi digital pemerintah desa tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis elektronik.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sehingga penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto. E, 2015:8). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan cara identifikasi karakteristik.

Menurut Hawadi (2002:107) menyatakan identifikasi adalah suatu prosedur yang dipilih dan yang cocok dengan ciri-ciri yang akan dicari dan selaras dengan program yang akan dikembangkan. Sedangkan karakteristik merupakan ciri atau karakteristik yang secara alamiah melekat pada diri seseorang yang meliputi umur, jenis kelamin, ras atau suku, pengetahuan, agama atau kepercayaan dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian, yakni desa dengan karakteristik, sebagai berikut: (1) Besarnya peranan kelompok primer; (2) Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi; (3) Homogen; (4) Hubungan lebih bersifat intim dan awet; (5) Mobilitas sosial rendah; (6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; dan (7) populasi anak dalam proporsi yang lebih besar (Roucek dan Warren, dalam Indrizal 2013).

Adapun tahapan penelitian meliputi pengurusan izin dan observasi pendahuluan (awal), persiapan sarana dan prasarana penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data, analisis data, serta pembuatan laporan dan seminar hasil. Tahapan tersebut digambarkan, sebagai berikut :



**Gambar 1. Alur Penelitian**

Sumber: Hasil Penelitian, 2022.

Tahap analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi hasil wawancara, dokumentasi dan hasil catatan lapangan.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1) Tingkat Literasi Digital**

Adapun hasil dalam penelitian ini, yakni tingkat literasi digital Pemerintah Desa Sadananya Kecamatan Sadananya cukup baik. Hal ini dikarenakan pihak Pemerintah Desa Sadananya telah mampu: (1) mengakses; (2) mengelola informasi; (3) mendesain pesan; (4) berbagi pesan, serta hal tersebut ditunjukkan pada platform WhatsApp (WA).

Pemilihan platform tersebut dikarenakan kemudahan dan konsep berbagi pesan yang mudah dipahami oleh seluruh pengguna. Dalam setiap platform media sosial yang populer saat ini, interaksi antar pengguna menjadi sangat penting. Intensitas interaksi yang terjadi dalam sebuah konten akan dibahas dalam bagian indikator penilaian keberhasilan suatu konten.

Semakin banyak hubungan yang terjalin antar pengguna sebuah platform media sosial, semakin besar pula kemungkinan interaksi yang akan terjadi, dan semakin banyak pula komunitas-komunitas yang terbentuk atas kesamaan minat yang dibagikan oleh masing-masing pengguna. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Desa Sadananya untuk mengedukasi masyarakatnya melalui WhatsApp. Penelitian ini telah dilaksanakan dengan terdapat 4 (empat) indikator yang terpenuhi dari 8 (delapan) indikator.

Literasi digital Pemerintah Desa Sadananya terfokus pada pemanfaatan media sosial. Media sosial merupakan sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan menyebarkan informasi. Pada gambar.2 terdapat beberapa kompetensi digital yang harus dimiliki, yaitu :

	Digital Identity	Digital Use	Digital Safety	Digital Security	Digital Emotional Intelligence	Digital Communication	Digital Literacy	Digital Rights
Digital Citizenship	1 Digital Citizen Identity	2 Balanced Use of Technology	3 Behavioural Cyber-Risk Management	4 Personal Cyber Security Management	5 Digital Empathy	6 Digital Footprint Management	7 Media and Information Literacy	8 Privacy Management
Digital Creativity	9 Digital Co-Creator Identity	10 Healthy Use of Technology	11 Content Cyber-Risk Management	12 Network Security Management	13 Self-Awareness and Management	14 Online Communication and Collaboration	15 Content Creation and Computational Literacy	16 Intellectual Property Rights Management
Digital Competitiveness	17 Digital Changemaker Identity	18 Civic Use of Technology	19 Commercial and Community Cyber-Risk Management	20 Organisational Cyber Security Management	21 Relationship Management	22 Public and Mass Communication	23 Data and AI Literacy	24 Participatory Rights Management

**Gambar.2 Kompetensi Digital**

Sumber: DQ Institute, 2021.

Kompetensi digital menjadi sebuah keharusan dalam berkehidupan secara *social culture* yang mengarah pada bentuk digitalisasi. Berdasarkan gambar.2 terdapat 24 (dua puluh empat) kompetensi digital yang harus dimiliki oleh seorang individu dan atau kelompok masyarakat agar mampu mempunyai kemampuan dalam hal literasi digital. Literasi digital merupakan sebuah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya mengkomunikasikan sebuah informasi yang benar dan relevan dengan kenyataan.

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi terdapat unsur unsur komunikasi (Cangara, 2016:27) kaitan antara unsur dengan unsur lainnya dapat dilihat, sebagai berikut: (1) Sumber; (2) pesan; (3) media; (4) penerima; (5) pengaruh; (6) tanggapan balik; dan (7) lingkungan. Komunikasi yang efektif akan memberikan dampak yang sesuai dengan harapan pemberi dan penerima informasi.

Berdasarkan gambar.2 juga dapat dilihat pula konstruksi sebuah kompetensi literasi digital terdiri dari: (a) *media and information literacy*; *content creation and computational literacy*; dan (c) *data and AI literacy*.

Merujuk dari hal tersebut, setidaknya terdapat penyelenggaraan pemerintahan dapat memanfaatkan *data and AI literacy* sebagai bagian dari langkah pembaharuan ke arah berkemajuan. *Media and information literacy* sangat diperlukan untuk mendapatkan data dan analisis data yang dimanfaatkan untuk penyelesaian sebuah permasalahan maupun berkaitan dengan arah penentuan kebijakan. Karena, keputusan dalam pengambilan kebijakan

memerlukan data dan informasi yang valid atau sesuai. Karena hal tersebut akan menunjukkan kesahihan suatu informasi dan data yang disebarakan.

## 2) **Perkembangan *Citizen Behavior***

Perkembangan internet telah menjadikan hampir semua hal bergantung pada jaringan dan signal internet. Aktivitas dan interaksi manusia telah memunculkan kelompok baru, yakni manusia yang aktif di dunia internet. Istilah yang saat ini muncul, yaitu berkaitan dengan netizen dan ataupun citizenship. Bahkan hal tersebut telah mencapai kearah *Citizenship Behavior Organizational* (COB). Menurut Sa'diyah, N. A. (2017) menyatakan *citizenship behavior* yang dapat meningkatkan produktivitas dan efektifitas instansi.

Begitu pula, Pemerintah Desa harus adaptif berkaitan dengan perkembangan internet dan tentunya hal tersebut menjadi peluang untuk lebih berinovasi dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Faktor penentu dalam keberhasilan dalam peningkatan layanan yaitu bergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM). Literasi digital merupakan sebuah pergerakan untuk memacu peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Menurut Anggraeni, H. (2019), menyatakan tentang literasi, bahwa Literasi digital sejatinya harus mampu mendorong seseorang (*digital citizen*) menjadi lebih dan arif.

Budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam peradaban manusia. Interaksi sosial, baik secara daring maupun luring merupakan hal yang wajar dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki

Bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi (Kusniyati, H., & Sitanggang, N. S. P., 2016). Warisan yang positif akan menghasilkan peradaban yang berkembang. Sehingga fokus penelitian ini sesuai dengan pendapat Tular Nalar (Astuti S.I.dkk, 2021:11) meliputi: (1) mengakses; (2) mengelola informasi; (3) mendesain pesan; (4) memproses informasi; (5) berbagi pesan; (6) membangun ketangguhan diri; (7) perlindungan data; (8) kolaborasi.

Konsep sosial dan kelayakan pada sebuah sistem informasi yang dimanfaatkan maupun diadopsi tentunya harus diimbangi dengan kecakapan digital pengguna, serta pemberi informasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan budayanya sehingga membentuk cara berpikir dan bertindak laku yang khas bagi para anggotanya (Kusherdiana, R., 2021). Pemikiran tersebut akan menghasilkan sebuah ide ataupun gagasan dalam bentuk pengembangan sebuah pengetahuan yang tersistematis.

Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Sadananya dalam peningkatan literasi digital masyarakatnya. Selain itu, platform tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk berdiskusi dan saling berkomunikasi. Segala perubahan atau pembaruan bergantung pada satu pihak yang biasa dikenal sebagai *webmaster*.

Namun kini, konten yang tersebar di media sosial sepenuhnya berada dalam kendali para pengguna *platform* tersebut. Hal inilah yang memperkuat Pemerintah Desa Sadananya dalam menggunakan *platform* tersebut.

### 3) Peran Pemimpin dalam Literasi Digital

Literasi digital di bidang pemerintahan tidak lepas dari peran seorang pemimpin yang menjadi acuan dalam implementasi program tersebut. Pemimpin sangat berperan dalam menjalankan suatu organisasi, begitu pula dalam lembaga pemerintahan (Nursetiawan, I., Ratnasari, T., & Sihabudin, A. A. (2022).

Pemimpin mempunyai kendali dalam kualitas pelayanan dalam lembaga pemerintahan. Sehingga, pemimpin merupakan subjek dan objek dalam merancang pengelolaan dan pelaksanaan suatu lembaga (Retnowati, D., & Nursetiawan, I., 2022).

Begitu pula dalam implementasi budaya literasi digital para perangkat desa dan pemerintah desa dapat dimulai dari seorang Kepala Desa dengan visioner dalam mencapai kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Desa pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam menentukan suatu kebijakan (Nurwanda, A., Badriah, E., & Nursetiawan, I., 2020).

Ketepatan strategi Kepala Desa dalam gerakan literasi digital kepada *khalayak ramai* tentunya menjadi alternatif lain, selain dari kebijakan yang diterapkan. Strategi alternatif yang diimplementasikan dengan pelibatan masyarakat dalam gerakan literasi digital, seperti pelibatan pemuda. Pendampingan pemuda secara formal maupun informal, penting untuk ditingkatkan (Astuti, E. Z. L., 2019).

Selain itu pula, diperlukan langkah reflektif dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan gerakan literasi digital, yakni dengan program pemberdayaan. Hal

itu dapat meningkatkan konten positif di tingkat perdesaan dan lebih luasnya bagi masyarakat (Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Anisa, R., 2019).

Pola pemberdayaan tersebut juga dapat melalui komunitas yang ada dan yang akan terbentuk, seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berada di wilayah perdesaan (Sujai, I., Taufiq, O. H., Nursetiawan, I., & Yuliani, D. (2021). Dengan adanya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat diharapkan diseminasi informasi dapat diimplementasikan dengan baik, serta berdampak pada peningkatan literasi digital, baik di Pemerintah Desa maupun masyarakat.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Budaya literasi digital Pemerintah Desa Sadananya telah dilaksanakan dengan cukup baik dan telah melampaui beberapa dimensi dalam fokus penelitian, yaitu: (a) mengakses; (b) mengelola informasi; (c) mendesain pesan; (d) memproses informasi; (e) berbagi pesan; dan (f) membangun ketangguhan diri.
2. Hanya dimensi perlindungan data dan kolaborasi yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, H. (2019). Penguatan Blended Learning Berbasis Literasi Digital

dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 190-203.

Astuti, E. Z. L. (2019). Gerakan literasi digital: studi pemberdayaan pemuda melalui program sistem informasi potensi kreatif desa di Kulonprogo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(2), 331-352.

Astuti S.I.dkk, (2021). *Modul Budaya Bermedia Digital*. Jakarta: Kemenkominfo.

Cangara, Hafied. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ditjen Aptika. (2022). Indeks Literasi Digital Indonesia 3.49, Ini yang Bisa Dilakukan Pemerintah. Tersedia (Online): <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/indeks-literasi-digital-indonesia-3-49-ini-yang-bisa-dilakukan-pemerintah>. Diunduh: 30 Juni 2022.

Hawadi. 2002. Identifikasi Keberbakatan Intelektual Melalui Metode Non Tes. Jakarta: PT Gramedia.

Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317-328.

Kusherdiana, R. (2021) Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya.

Kusniyati, H., & Sitanggang, N. S. P. (2016). Aplikasi Edukasi Budaya

- Toba Samosir Berbasis Android. *Jurnal teknik informatika*, 9(1).
- Nursetiawan, I., Ratnasari, T., & Sihabudin, A. A. (2022). Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 75-90.
- Nurwanda, A., Badriah, E., & Nursetiawan, I. (2020). Memahami Kebijakan Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Ciamis: Dinamika Sumber Daya Alam Lokal Dan Kebudayaan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 136-149.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Anisa, R. (2019). Pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 31-43.
- Rianto Puji ,et al. (2017). Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi. Yogyakarta: Pemantau regulasi dan Regulator media (PR2 Media).
- Retnowati, D., & Nursetiawan, I. (2022). Efektivitas Pelayanan Berbasis Online Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.
- Sa'diyah, N. A. (2017). *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Dosen Tetap Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sujai, I., Taufiq, O. H., Nursetiawan, I., & Yuliani, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 3(2), 246-254.
- Sugiarto. E. 2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.